



Analisis Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan

**Mayshel Adinda Viola¹, Friska Aqilah Vilanti², Indah Afidah Rahman³, Masita⁴,
Indri Fitriyanti Gustian⁵, Julia Dwi Mawarni⁶, Hansein Arif Wijaya⁷,
Frisilla Wulan Tersta⁸**

Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi,
Jambi, Indonesia

Email: adindaviola589@gmail.com, friskaqila14@gmail.com, indahafidah27@gmail.com,
masitaannaila@gmail.com

***Abstract :** This article aims to find out how to evaluate the education management system in Indonesia, identify problems or obstacles in implementing education management standards, discuss a number of obstacles in managing education, provide an understanding of the importance of education management standards to improve the quality of education in Indonesia, and provide related policy recommendations implementation of educational management standards to overcome various existing obstacles. Education management is the process of planning, organizing, leading and controlling educational resources to achieve educational goals effectively and efficiently. With good educational management, it is hoped that the process of transferring knowledge to students can run effectively and educational goals can be achieved. The topic of discussion in this article is the readiness of Human Resources (HR) who do not yet understand education management standards, budget limitations, weak monitoring and evaluation, low teacher quality, unvaried learning methods, and low student literacy. This research uses a literature study research method. Literature study is a series of actions that include reading, recording, and processing research material. Data sources for this research are books, journals and articles related to the research topic. Low understanding of human resources causes difficulties in planning, implementation, monitoring and evaluation. Budget limitations make it difficult for schools to provide quality facilities and infrastructure. Weak evaluation and supervision make it difficult to measure standard achievement. Low teacher quality causes difficulties in achieving graduate process and competency standards. Learning methods that do not vary make standard targets hampered and conflict with the process. Low student literacy is caused by internal and external factors. The researcher's hope is that this article can be a useful reference regarding the implementation of educational standards policies.*

Key Words: *Implementation; Management; Education*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia diterapkan, mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam menerapkan standar pengelolaan pendidikan, membahas sejumlah kendala dalam mengelola pendidikan, memberikan pemahaman tentang pentingnya standar pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait penerapan standar pengelolaan pendidikan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Pengelolaan pendidikan adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan pengelolaan pendidikan yang baik, proses transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik diharapkan dapat berjalan secara efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Adapun topik pembahasan dalam artikel ini adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memahami standar pengelolaan pendidikan, keterbatasan anggaran, pengawasan dan evaluasi yang masih lemah, kualitas guru yang masih rendah, metode pembelajaran yang tidak bervariasi, dan literasi siswa yang rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian tindakan yang mencakup membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian. Sumber data untuk penelitian ini adalah buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Rendahnya pemahaman SDM menyebabkan kesulitan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Keterbatasan anggaran membuat sekolah sulit memnuhi kualitas sarana dan prasarana. Evaluasi dan pengawasan yang lemah berdampak pada sulitnya mengukur pencapaian standar. Kualitas guru yang rendah menyebabkan kesulitan dalam mencapai standar proses dan kompetensi lulusan. Metode pembelajaran yang tidak



bervariasi membuat target standar terhambat dan bertentangan dengan proses. Rendahnya literasi siswa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Harapan peneliti semoga artikel ini bisa menjadi referensi bermanfaat tentang implementasi kebijakan standar pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi; Pengelolaan; Pendidikan

Pendahuluan

Menurut Sutisna (1983), kata “pengelolaan” berasal dari kata “manajemen”. Namun, manajemen dan administrasi adalah kata yang sama. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan standar administrasi disekolah. Pengelolaan pendidikan, menurut Sukirman (1998), mencakup tata letak, pengaturan, kegiatan lainnya terkait dengan lembaga pendidikan dan setiap komponennya, serta pranata dan lembaga lain. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan digunakan semua sumber daya yang ada di sekolah. Pengelolaan pendidikan biasanya didefinisikan sebagai sekumpulan tindakan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan seluruh upaya untuk mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Adapun peraturan yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Proses mengatur dan mengendalikan berbagai aspek pendidikan dikenal sebagai peengelolaan pendidikan. Hal ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Latar belakang pengelolaan pendidikan anatara lain akan menunjukkan betapa pentingnya standar pengelolaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, serta peran kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan sarana, prasarana, keuangan, kebudayaan, lingkungan hidup, dan kemitraan sekolah. Pengelolaan pendidikan juga mencakup pelaksanaan fungsi administratif seperti seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengadilan. Pengelolaan pendidikan juga mencakup tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, guru, dan administrasi yang bekerja untuk mencapai tujuan pendidikan.

Keberhasilan pengelolaan pendidikan juga dipengaruhi oleh elemen luar seperti lingkungan sosial dan pekerjaan guru. Akibatnya pengelolaan pendidikan merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaan pendidikan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas sistem pendidikan negara. Pengelolaan yang efektif dan adaptif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang tinggi dalam hubungan kekuatan global yang harus berubah. Masyarakat dan siswa sangat penting dalam menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Pengelolaan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap pembelajaran berkualitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses, kemajuan teknologi, dan perspektif pedagogi. Kita akan mengkaji strategis, kebijakan, dan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan yang diperlukan untuk bekerja sama untuk mengelola pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masa depan.



Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan suatu bangsa, tetapi untuk mencapai tujuan ini diperlukan pengelolaan pendidikan yang baik dan responsif terhadap perubahan zaman. Pengelolaan pendidikan adalah proses yang kompleks yang melibatkan penerapan kebijakan yang tepat, pengawasan yang cermat, pengorganisasian yang efektif, dan perencanaan strategis. Pengelolaan pendidikan harus mampu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang tepat dan menyeluruh setiap individu saat teknologi berkembang pesat dan dinamika sosial berubah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan pembelajaran yang tepat. Kebijakan pendidikan seperti pembagian sumber daya, instruksi, dan kurikulum yang memenuhi standar akademik. Namun, pendidikan yang adil juga memerlukan partisipasi aktif dari guru, lembaga pendidikan, orang tua, siswa, dan masyarakat. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, pengelolaan pendidikan juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan akses ke pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan pendidikan di sekolah menengah menghadapi banyak tantangan, termasuk menanggapi perubahan kurikulum, meningkatkan kualitas guru, menyediakan lingkungan belajar yang beragam dan inklusif, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Dalam era perubahan yang terus menerus, pendekatan pengelolaan yang efektif adalah kunci keberhasilan sekolah menengah.

Kajian Teori

Menurut Griffin (2004), pengelolaan berarti mencapai tujuan organisasi dengan memaksimalkan kinerja tugas dan tanggung jawab setiap anggota serta memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya organisasi. Nugroho (2003:119) menyatakan bahwa dalam bidang manajemen, “pengelolaan” adalah istilah yang digunakan. Istilah “pengelolaan” berasal dari kata “kelola”, yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Secara etimologis, pendidikan adalah proses perkembangan seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Priatna (2004:27) bahwa pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas diri manusia dalam semua aspeknya. Menurut Hidayat & Machali (2012), pengelolaan pendidikan adalah proses kerja sama yang menggunakan seluruh sumber daya manusia dan materi yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, menjelaskan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan atau studi pustaka didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mencakup membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian (Zed, 2003). Studi kepustakaan sama dengan mengumpulkan data dari banyak sumber bacaan. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berupa buku, jurnal, dan artikel. Studi kepustakaan memiliki beberapa karakteristik yaitu peneliti memiliki akses langsung dengan teks atau naskah, data kepustakaan bersifat permanen dan dapat digunakan, dan biasanya dianggap sebagai data sekunder karena data dikumpulkan oleh peneliti dari sumber alternatif daripada data asli yang ditemukan dilapangan (Zed, 2014). Penelitian kepustakaan juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang melibatkan analisis teks atau wacana yang menyelidiki peristiwa, baik dalam tulisan atau pementaran (Hamzah, 2020:7). Penelitian menggunakan alat



literasi digital seperti *Google Scholar* atau lainnya untuk mengumpulkan dan menyatukan data untuk mendapatkan informasi mengenai topik yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam mengimplementasikan standar pengelolaan pendidikan tentu saja tidak selalu berjalan dengan baik. Tentunya terdapat hambatan dalam mengimpelentasikan standar pengelolaan pendidikan, berikut beberapa permasalahan yang dapat menghambat dalam mengembangkan standar pengelolaan pendidikan:

1. Rendahnya Pemahaman Sumber Daya Manusia

Tidak ada kompetensi dan keterampilan SDM yang memadai untuk menerapkan standar pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah, guru, pengawas, dan dinas pendidikan belum sepenuhnya memahami mengenai apa itu standar pengelolaan pendidikan (Kemendikbud, 2021). Peningkatan kapasitas dan pemahaman SDM pengelolaan sekolah tentang standar pengelolaan pendidikan sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan standarisasi pendidikan. Implementasi kebijakan tersebut dapat terhambat oleh sumber daya manusia yang tidak memahami standar pengelolaan pendidikan. Maka ada beberapa dampak yang disampaikan oleh para ahli mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang belum memahami standar pengelolaan pendidikan yaitu: *pertama* kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program: jika sumber daya manusia pengelola sekolah tidak memahami prinsip-prinsip pengelolaan, mereka akan menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program sekolah dengan cara yang sesuai standar (Rohiat, 2008). *Kedua* jika sumber daya manusia tidak memahami standar pengelolaan, akan sulit untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif. Mereka akan mengalami kesulitan melakukan monitoring implementasi standar dan evaluasi keberhasilan pencapaiannya (Asmani, 2012). *Ketiga* pencapaian standar kompetensi lulusan terganggu. Pencapaian Surat Keterangan Lulus (SKL) akan sulit dicapai jika SDM yang bertanggung jawab untuk mengelola sekolah sendiri tidak memahami pentingnya standar pengelolaan (Anjarsari, 2020). *Keempat* jika SDM pengelolaan sekolah tidak memahami konsep pengelolaan standar, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan manajemen sekolah akan sulit (Wahyudi, 2009).

2. Keterbatasan Anggaran

Sabrina & Effane (2022) mengatakan bahwa disatu sisi peningkatan kualitas diperlukan tetapi disisi lain pendidikan di Indonesia menghadapi masalah anggaran yang terbatas. Anggaran penting, tetapi kesepakatan kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang didukung oleh tekad bersama lebih penting dari pada anggaran. Pendanaan adalah masalah pertama yang harus dihadapkan oleh pengelolaan pendidikan. Kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan terbatas, salah satu contohnya adalah gedung sekolah yang tidak layak. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pemerintah di posisi yang sangat sulit. Untuk memenuhi kebutuhan sektor pendidikan, pemerintah (pusat atau daerah) harus mengalokasikan setidaknya 20% anggarannya, di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kinasan. Karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat dan daerah, menurut Yustikia (2017), pemerintah daerah harus memiliki informasi yang jelas tentang jenis dan tingkat kebutuhan minimal sarana pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan, bahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan di setiap



jenjang perlu dikaji secara ilmiah, hal ini berguna untuk meningkatkan daya saing pendidikan ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Hingga sampai saat ini Keterbatasan anggaran masih menjadi faktor utama dalam pengelolaan pendidikan. Anggaran yang terbatas menyebabkan sekolah kekurangan dana untuk mengelola sarana dan prasarana yang ada, terutama pada sekolah-sekolah didaerah terpencil khususnya.

Menurut Yuliantanty dkk (2018) salah satu dalam mengatasi masalah pengelolaan sekolah adalah anggaran sekolah. Seiring perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi, peningkatan kualitas pendidikan menjadi tantangan karena keterbatasan sumber-sumber penerimaan sekolah dari orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat. Regulasi administrasi keuangan negara ketat mengatur dana pemerintah, baik APBN maupun APBD. PERMENDIKNAS Nomor 44 Tahun 2012 melarang SD/MI dan SMP/MT untuk menarik pungutan pendidikan dari orang tua murid. Hal ini menghalangi upaya untuk membangun sumber penerimaan masyarakat, khususnya dari orang tua murid. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kendala ini membutuhkan dukungan dari masyarakat. Regulasi keuangan daerah yang digunakan sebagai dasar pengelolaan APBD membuat model pengelolaan anggaran sekolah kurang dikembangkan. Untuk memahami masalah dan kebutuhan pendidikan dan mendukung pemenuhan anggaran pendidikan, partisipasi masyarakat harus dimasukkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, keterlibatan masyarakat dalam mengupayakan pendanaan pendidikan sangat mungkin dijamin. Dalam model pengelolaan anggaran sekolah, upaya untuk mengidentifikasi sumber daya, mengkolaborasi aspirasi dan pentingnya meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia diwadahi dan diakses. Pengalaman sekolah dalam pengelolaan anggaran membantu merancang penganggaran, penatausahaan, dan pertanggung jawaban yang sesuai dengan keinginan dan sumber daya semua pemangku kepentingan.

3. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Masih Lemah

Menurut Fattah (2013) pengawasan dan evaluasi kinerja masih lemah sehingga implementasi standar cenderung berjalan lambat dan tidak optimal. Pengembangan sistem yang memungkinkan pengawasan dan evaluasi kinerja sangat penting untuk menerapkan sistem pengelolaan pendidikan yang konsisten. Pengawasan dan evaluasi kinerja masih memiliki pengaruh yang lemah terhadap pengelolaan pendidikan. Adapun beberapa dampak pengawasan dan evaluasi kinerja yang masih lemah yaitu : *Pertama* akan sulit mengukur apakah standar proses dan kompetensi lulusan telah terpenuhi. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang memadai, sekolah tidak dapat mengukur apakah standar proses pembelajaran dan kompetensi peserta didik telah terpenuhi (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). *Kedua* tidak adanya pengawasan dan evaluasi kinerja yang efektif akan menyebabkan kekurangan data dan masukan untuk melakukan perbaikan kualitas yang berkelanjutan disekolah (Asmani, 2012). *Ketiga* standar sarana dan prasarana seringkali tidak mencapai standar yang ditetapkan karena kurangnya pengawasan (Rohiat, 2008). *Keempat* penyimpangan standar pembiayaan tidak dapat dideteksi karena kesalahan evaluasi yang menyebabkan penyimpangan dan in-efisiensi penggunaan anggaran pendidikan tidak dapat diidentifikasi dan di perbaiki segera (Fattah, 2004). *Kelima* kultur sekolah yang tidak disiplin dan berkualitas, tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, sekolah cenderung tidak memotivasi siswa untuk menjalankan prosedur yang disiplin dan berkualitas tinggi (Sallis, 2012).



Menurut Safitri dkk (2022) pengawasan adalah komponen penting dari pengelolaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi pengawasan di Indonesia masih rendah, yang menyebabkan program tidak berjalan dengan baik, kegagalan dan kelemahan pengawasan dalam meningkatkan kinerja guru termasuk beban kerja yang cukup besar, kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk tupoksi pengawas, dan kurangnya dukungan birokrasi (Sunengsih, dkk. 2021).

4. Kualitas Guru Yang Masih Rendah

Kinerja, kompetensi, dan kemampuan guru yang berbeda pasti dipengaruhi oleh kualitas guru yang buruk. Pada akhirnya, ini berdampak pada kinerja guru dalam meningkatkan pendidikan secara keseluruhan, terutama pembelajaran. Danim (2006: 168) menyatakan bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum sepenuhnya di tolong oleh penguasaan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja guru, upaya yang komprehensif diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kebanyakan guru di Indonesia tidak memiliki profesionalisme yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Undang-Undang ini menetapkan bahwa guru bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Banyak guru masih gagal melakukan tugas mereka dengan baik dalam situasi saat ini. Misalnya, mereka datang terlambat ke kelas, tidak memahami konsep materi yang diajarkan, berbicara lebih banyak dari pada menjelaskan materi, atau tidak memahami karakter siswa. Beberapa guru bahkan hanya datang ke kelas untuk memberikan tugas dan kemudian pergi. Meskipun keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, pengajaran berada di pusat pendidikan sebagai cermin kualitas tenaga pengajar. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas guru yang buruk adalah tingkat kesejahteraan guru yang sangat rendah di Indonesia. Keterbatasan guru dalam sistem pembelajaran juga merupakan contoh kualitas guru yang buruk, seperti guru yang selalu menggunakan sistem pembelajaran yang monoton untuk siswanya. Sistem ini menetapkan peraturan bahwa siswa tidak boleh bertanya selama guru menyampaikan materi. Akibatnya, siswa akan malas bertanya dan seringkali mereka tidak memperhatikan guru ketika mereka menjelaskan materi, sehingga tidak ada komunikasi aktif antara guru dan siswa.

Menurut Yunus (2018), masalah guru tidak hanya sulit tetapi juga tidak terlalu kompleks. Jika kita berbicara tentang kualitas guru, kita harus menentukan apa yang menyebabkan guru tidak memiliki kualitas yang baik. Empat alasan mengapa kompetensi guru rendah dalam hal ini: (1) Pandangan guru tentang profesinya. (2) Kualitas guru yang tidak sebanding dengan gelar sarjana. (3) Program penelitian dan peningkatan keprofesionalan guru yang kurang. (4) Rekrutmen guru yang tidak efektif. Richard Ingersoll, seorang ahli terkenal dalam pengangkatan dan pemberhentian guru, menyatakan bahwa masalah organisasi di dalam sekolah lebih dari pada kekurangan guru berkualitas. Karena masalah keuangan, kepala sekolah lebih mudah memilih guru yang kurang berkualitas dari pada yang berkualitas tinggi. Selama kurang lebih lima tahun, guru yang berpengalaman dan berkualitas tinggi dalam bidangnya dibentuk, sedangkan guru yang tidak berkualitas tetap di pekerjakan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas guru yang masih rendah adalah salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak guru



tidak memiliki kompetensi dan profesionalisme yang diperlukan. Kualitas guru yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti pemahaman yang buruk tentang materi dan metode mengajar, pembelajaran yang monoton, dan ketidakpahaman tentang karakteristik siswa. Hal ini menyebabkan standar proses dan kompetensi lulusan menjadi sulit untuk dicapai. Selain itu, kesejahteraan guru yang buruk disebut sebagai penyebab kualitas guru yang rendah. Selain itu, hal-hal seperti sistem rekrutmen guru yang kurang efisien dan prioritas keuangan dari pada kualitas pendidikan yang rendah dan tantangan untuk memenuhi standar pengelolaan pendidikan.

5. Metode Pembelajaran Yang Tidak Bervariasi

Pendidik biasanya menggunakan satu metode pembelajaran yang tidak bervariasi atau monoton. Siswa tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar jika mereka tidak memahami materi atau apa yang diberikan guru kepada mereka. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang tidak bervariasi ini dapat menyebabkan siswa jenuh selama proses belajar. Oleh karena itu, pendidik harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang menarik dan bervariasi (Rahma, 2022)

Metode pembelajaran yang tidak bervariasi ini juga menjadi salah satu kendala dalam menerapkan pengelolaan pendidikan. Metode pembelajaran yang tidak bervariasi dapat berdampak negatif pada penerapan standar pengelolaan pendidikan karena dapat menyebabkan siswa bosan dan tidak termotivasi. Metode pembelajaran yang monoton akan membuat siswa bosan dengan cepat. Hal ini mengurangi keinginan mereka untuk belajar. Meskipun motivasi belajar sangat penting untuk mencapai kompetensi lulusan, hal ini juga menghambat pencapaian standar pengelolaan. Hal ini terjadi karena standar kompetensi lulusan sangat beragam dan metode pembelajaran yang digunakan tidak cukup untuk membekali siswa dengan kompetensi tersebut. Akibatnya, pencapaian standar pengelolaan terhambat, yang tentunya tidak memenuhi persyaratan proses pembelajaran yang standar. Proses standar membutuhkan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi siswa. Metode pembelajaran yang tidak bervariasi jelas tidak memenuhi persyaratan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi pendidikan untuk mendorong guru untuk terus berinovasi dengan berbagai metode pembelajaran. Ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan secara keseluruhan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran monoton dapat membuat siswa jenuh dan bosan dengan cepat. Akibatnya, siswa menjadi tidak tertarik lagi untuk belajar. Namun, motivasi belajar sangat penting untuk mencapai kompetensi lulusan. Metode pembelajaran yang tidak bervariasi tidak cukup untuk membekali siswa dengan kemampuan yang diperlukan untuk standar kelulusan, dan ini pasti akan menghambat pemenuhan standar. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus mendorong pendidik untuk berinovasi dengan menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran. Ini juga sangat penting untuk mendukung kebijakan pengelolaan pendidikan yang ketat.

6. Kualitas Literasi Siswa Yang Masih Rendah

Karena masyarakat tidak menyadari apa itu literasi serta manfaatnya, maka kemampuan literasi di Indonesia sangat rendah. Literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Meskipun keduanya belum menjadi budaya di negara kita,

kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya harus dimulai dengan keduanya. Menurut beberapa lembaga survei, budaya literasi di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Faktor internal dan eksternal adalah penyebab rendahnya literasi siswa masih rendah.

Faktor internal

- 1) Rendahnya kemampuan menerima dan memecahkan masalah (*inteligensi*) pada siswa

Hal ini sesuai dengan teori Djamra (2002), yang membagi alasan mengapa pembelajaran tertunda adalah disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Salah satu komponen internal ini adalah intelegensi siswa. Adaptasi atau penyesuaian individu dengan lingkungannya, kemampuan belajar, dan inteligensi abstrak adalah beberapa definisi inteligensi menurut Purwanto (2011). Inteligensi adalah kemampuan untuk belajar sesuatu yang baru. Kemampuan belajar setiap siswa berbeda-beda, yang tentunya menyebabkan perbedaan dalam literasi baca tulis.

- 2) Rendahnya motivasi pelajar

Menurut teori Pramesti (2018), kurangnya minat siswa dalam belajar adalah penyebab internal dari kurangnya kemampuan siswa dalam literasi baca dan menulis. Ketidakmampuan siswa untuk membaca meskipun belajar adalah proses, seseorang yang ingin belajar, baik dalam tingkah laku maupun tindakan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran. Salah satunya adalah bahwa guru menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menyampaikan informasi seperti pendekatan pembelajaran yang tidak menarik dan penyampaian informasi yang tidak menarik. Selain itu, motivasi untuk belajar dapat berdampak pada semangat belajar siswa.

- 3) Rendahnya pelajar siswa

Faktor internal yang terlibat pada kurangnya literasi baca dan menulis siswa adalah kurangnya keinginan untuk belajar terhadap siswa. Sangat penting bagi siswa untuk memiliki motivasi untuk belajar selama proses pembelajaran agar mereka memiliki semangat tinggi untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu faktor yang terlibat pada tingkat literasi yang dinyatakan oleh siswa adalah kurangnya dorongan. Hal ini sejalan dengan teori. Pramesti (2018) Menyatakan bahwa komponen penyebab kegagalan literasi baca siswa tidak memiliki keinginan untuk belajar karena mereka tidak menulis. Rendahnya tingkat motivasi baik dari orang tua maupun dari guru dapat berdampak kemampuan siswa untuk membaca dan menulis dengan literasi. Hamzah (2014) motivasi belajar adalah dorongan untuk belajar psikologis individu yang melakukan sesuatu tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Hamzah, indikator motivasi belajar dapat dikategorikan sebagai adanya keinginan dan keinginan akan terwujud.

Faktor Eksternal

- 1) Tidak ada perhatian orang tua

Faktor Ini terlibat pada tingkat rendahnya literasi siswa pada tingkat awal. Tidak adanya perhatian dari orang tua menyebabkan siswa tidak begitu termotivasi untuk belajar. Akibatnya, siswa tidak memiliki kemampuan baca tulis yang cukup. Ini sesuai dengan teori bahwa faktor lingkungan keluarga, seperti persahabatan

orang tua yang tidak bahagia, keuangan, dan lainnya, adalah penyebab siswa memiliki kemampuan membaca yang buruk. Selain itu, menurut Saliza (2021), faktor lingkungan yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis siswa termasuk pengalaman dan latar belakang siswa di rumah, ekonomi, dan keluarga siswa.

2) Pengaruh teknologi (Televisi dan Handphone)

Televisi dan telepon seluler juga memengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Ini sejalan dengan ide yang diusulkan Witanto (2018) yang Klaim bahwa kemajuan teknologi informasi mengalihkan perhatian siswa ke arah aktivitas seperti membaca buku. dengan menonton televisi mengalihkan perhatian siswa ke arah yang berbeda. Kemajuan dalam teknologi handphone, yang menawarkan fitur seperti bermain game dan berbicara dari jarak jauh, juga dapat memengaruhi kemampuan siswa dalam membaca dan menulis.

3) Pengaruh teman bermain

Kemampuan literasi siswa menurun karena pengaruh teman bermain. Ini sejalan dengan teori Djamrah (2002), yang mengatakan bahwa teman bermain yang tidak menyenangkan adalah alasan siswa gagal membaca dan menulis. Anak-anak dapat dipengaruhi oleh tempat mereka bermain, terutama tempat bermain mereka. Kemampuan baca tulis siswa dapat dipengaruhi oleh teman sepermainan yang nakal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa teman sepermainan siswa lebih cenderung mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain game, bermain game online, dan menonton kartun di televisi. Hal ini membuat perhatian dan waktu siswa terbuang sia-sia, meskipun ada banyak kegiatan yang lebih bermanfaat untuk dilakukan, seperti belajar bersama, bermain sambil belajar, dan mengerjakan PR bersama.

4) Kemampuan pendidik

Kemampuan guru adalah komponen yang berkontribusi pada tingkat literasi yang rendah. Menurut Rohani (2020) bahwa pendekatan pendidik, prosedur, dan keahlian guru juga dapat diakses, sehingga tulisan siswa guru sangat penting untuk pendidikan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, lingkungan pendidikan guru sangat penting. Pendidikan tidak akan berhasil tanpa partisipasi guru. Tidak peduli seberapa canggih kurikulum, visi dan misi, dan fasilitasnya, semuanya akan gagal jika gurunya tidak mengajar dengan baik. Jika penyebabnya adalah kemampuan siswa untuk membaca dan menulis yang buruk, guru tidak terlalu kreatif dan inovatif, dan desain pendidikan, metodologi, dan strategi pembelajaran yang monoton digunakan karena hanya menggunakan pendekatan ceramah dan penugasan. Dalam hal ini, instruksi hanya berpusat pada hanya menyampaikan informasi, yang mengakibatkan kemampuan literatur.

5) Prasarana dan Sarana

Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya literasi pada siswa. Bersamaan dengan teori Witanto (2018) bahwa sarana dan prasarana kegiatan literasi yang terbatas, seperti ketersediaan buku dan perpustakaan, dapat menyebabkan siswa gagal dalam literasi basa tulisan. Jenis buku bacaan yang berbeda juga dapat menjadi penyebab. Selain itu, itu sejalan dengan teori Hapsari (2019), yang menyatakan bahwa perangkat sekolah atau fasilitas berdampak pada kemampuan membaca siswa karena perangkat



tersebut merupakan sarana untuk membantu pembelajaran. Untuk proses pengetahuan bertahan, prasarana dan fasilitas ini diperlukan untuk membantu pendidikan. Infrastruktur sekolah seperti perpustakaan, gedung sekolah, kamar mandi, papan tulis, penghapus, spidol, media pendidikan yang menarik, alat peraga, dan metode merupakan prasarana tambahan untuk mendukung.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam mengimplementasikan standar pengelolaan pendidikan, yaitu yang *pertama*, rendahnya pemahaman SDM pengelola pendidikan terhadap standar yang menyebabkan kesulitan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sekolah sesuai standar yang ditetapkan. *Kedua*, keterbatasan anggaran membuat sekolah sulit memenuhi standar sarana prasarana dan mengelola sumber daya secara optimal. Perlu partisipasi masyarakat dan regulator yang mendukung untuk mengatasinya. *Ketiga*, lemahnya pengawasan dan evaluasi kinerja berdampak pada sulitnya pengukuran capaian standar, melakukan perbaikan berkelanjutan dan mendeteksi penyimpangan. *Keempat*, rendahnya kualitas guru menyebabkan kesulitan pencapaian standar proses dan kompetensi lulusan. Perlu peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. *Kelima*, metode pembelajaran monoton membuat capaian standar terhambat dan bertentangan dengan standar proses. Perlu inovasi metode pembelajaran oleh guru. *Keenam* rendahnya literasi siswa disebabkan faktor internal seperti motivasi rendah dan faktor eksternal seperti kurangnya dukungan orangtua, fasilitas belajar, dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Anjarsari, P. 2020. *Strategi Implementasi Kebijakan Standar Pengelolaan*. Malang: Intelegensia Media.
- Asmani, J. M. 2012. *Kiat Mengelola dan Mendirikan Sekolah*. Jogjakarta: Diva Press.
- Danim, S. 2006. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2003. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Djamrah, S. 2002. Faktor- Faktor Penyebab Kesulitan Membaca. *Jurnal Pendidikan*, 2(3), 221-230.
- Fattah, N. 2004. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. 2013. Evaluasi Kinerja Pengimplementasian Standar di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 25-35.
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research Dilingkupi Contoh, Proses dan Hasil 6 Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Indonesia.\
- Hamzah, B. 2014. Teori dan Pengukuran Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(1), 47-58.



- Hapsari, D. 2019. Pengaruh Fasilitas Sekolah terhadap Kemampuan Membaca Siswa. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(2), 101-110.
- Hidayat, Ara & Machali, Imam. 2012. *Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip*. Jakarta: kuakaba.
- Kemendikbud. 2021. Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Mardika, A. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca dan Menulis Siswa. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 1-12.
- Mendikbud RI. 2023 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 47 Tahun 2023.
- Mendiknas RI. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elek Media Kompotindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pramesti, G. 2018. Faktor Penyebab Kegagalan Literasi Baca Siswa. *Jurnal Pendidikan Membaca*, 3(1), 50-60.
- Priatna, T. 2004. *Reaktualisasi Pradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka
- Purwanto, N. 2011. *Pengantar Psikologi Intelegensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohani, A. 2020. Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(2), 101-110.
- Rohayati, A. 2015. *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah*. Bandung: Refika aditama.
- Sabrina, S.N & Effane, Anne. 2022. Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Dan Komflik Dalam Mahalnya Biaya Pendidikan. *Karimah Tauhid, Vol 1, No. 1*.
- Safitri, H. D. A., Putri, N. A., Prasetyo, G. B., Sumekar, P. J., & Maisyaroh. 2022. Kinerja Pengawas Sekolah Yayasan Pada Jenjang Pendidikan Menengah Pertama: Perspektif Guru dan Kepala Sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Vo.10, No. 2*.
- Saliza, E. 2021. Pengaruh Lingkungan terhadap Kemampuan Membaca Pemula Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(1), 55-65.
- Sallis, E. 2012. *Total Quality Management in Education*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Sukirman, Hartati. 1998. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Sutisna, Oteng. 1983. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.
- Sunengsih, N., Syaodih, C., & Soro, H. S. 2021. Implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Kota Bandung. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol. 4, No. 7, hal 621- 632*.



- Wahyudi. 2009. *Kepimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Witanto, D. 2018. Sarana dan Prasarana Pendukung Literasi Baca Tulis Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Sastra*, 4(1), 76-89.
- Yulianty, S., Handriadi., & Rahmi, A. 2018. Pengelolaan Anggaran Sekolah Berbasis Partisipasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok. *UNES Journal of Social and Economics Research*. Vol. 3, No. 2.
- Yunus, S. 2018. Masalah Kualitas Guru di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan*. Vol 4, No.2, hal 125-135.
- Yustikia N. W. S. 2017. Pentingnya sarana pendidikan dalam menunjang kualitas pendidikan desekolah. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, Vol.4, No.2, hal 1-12.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zed, M. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.